



PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: APBN, FISKAL DAN MONETER.

Sifah Faoziah
Darul Ma'arif Indramayu University
sifahfaoziah15@gmail.com

Rifqi
Darul Ma'arif Indramayu University
rifqi816@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Oktober 2025
Accepted: Desember 2025

Revised : November 2025
Available online : Desember 2025

How to Cite: Author. (2025). Title. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan*, 1(4), 167–175. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i4.27>

ABSTRACT

The government plays a strategic role in the national economy as a regulator, coordinator, and guarantor of public welfare. This role is manifested through regulatory functions, income redistribution, economic stabilization, the provision of economic stimulus, and protection for economic actors. In carrying out these roles, the government utilizes key policy instruments, namely the State Budget (APBN), fiscal policy, and monetary policy, which are interrelated and mutually reinforcing. The APBN serves as an instrument of planning, authorization, supervision, allocation, distribution, and economic stabilization, while also functioning as an essential tool for promoting economic growth and equitable development. Nevertheless, the management of the APBN continues to face challenges, particularly with regard to transparency and budget oversight, as reflected in cases of budget mismanagement that have resulted in state losses and hindered development efforts. Fiscal policy plays a crucial role in influencing macroeconomic conditions through the regulation of taxation, government expenditure, and deficit financing, implemented in the form of either expansionary or contractionary policies to maintain economic stability and fiscal sustainability. Meanwhile, monetary policy, implemented by the central bank, focuses on controlling the money supply, maintaining price stability, stabilizing the exchange rate, and safeguarding the financial system,

while also taking into account global economic dynamics and developments in financial technology. From an Islamic economic perspective, monetary policy emphasizes principles of justice, equity, and the prohibition of *riba* (interest). The synergy between the APBN, fiscal policy, and monetary policy is essential in achieving stable, inclusive, and sustainable economic growth in Indonesia.

KEY WORDS: Government Role; State Budget (APBN); Fiscal Policy; Monetary Policy; Economic Stability; Sustainable Development; Islamic Economics.

ABSTRAK

Pemerintah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai pengendali, pengarah, dan penjamin kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi regulasi, redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, pemberian stimulus, serta perlindungan terhadap pelaku ekonomi. Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan utama berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter yang saling terintegrasi. APBN berfungsi sebagai alat perencanaan, otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi, sekaligus menjadi sarana penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun demikian, pengelolaan APBN masih menghadapi tantangan, terutama terkait transparansi dan pengawasan anggaran, sebagaimana tercermin dari kasus penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara dan terhambatnya pembangunan. Kebijakan fiskal berperan dalam memengaruhi kondisi makroekonomi melalui pengaturan pajak, belanja negara, serta pembiayaan defisit, baik dalam bentuk kebijakan ekspansif maupun kontraktif, guna menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sementara itu, kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh bank sentral berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar, stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan, dengan tetap mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi finansial. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter juga menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan larangan *riba*. Sinergi antara APBN, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

KATA KUNCI: Peran Pemerintah; APBN; Kebijakan Fiskal; Kebijakan Moneter; Stabilitas Ekonomi; Pembangunan Berkelanjutan; Ekonomi Islam.

INTRODUCTION

Stabilitas ekonomi merupakan hal penting dalam menjaga kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai kondisi tersebut, pemerintah memegang peran yang sangat penting sebagai pihak yang mengatur, mengawasi, dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan agar perekonomian berjalan secara seimbang sehingga aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi dapat berlangsung dengan baik.

Namun, perekonomian modern menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Inflasi yang naik turun dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara pengangguran menunjukkan bahwa kesempatan kerja belum sepenuhnya tersedia. Ketimpangan pendapatan juga menjadi persoalan serius karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Selain itu, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil juga sulit, terutama ketika ekonomi global mengalami ketidakpastian, seperti perubahan harga komoditas, perkembangan teknologi, dan kondisi pasar dunia.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menggunakan beberapa instrumen

utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. APBN menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung pembangunan dan mengurangi ketimpangan. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter berfungsi menjaga kestabilan inflasi dan nilai mata uang. Ketiga instrumen ini bekerja secara saling melengkapi sehingga pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari beragam sumber literatur, seperti artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, serta disertasi yang memiliki keterkaitan dengan kajian Islam, etika kewarganegaraan, dan demokrasi. Literatur yang dianalisis meliputi sejumlah karya, antara lain Ulfah et al. (2021), Hermawan dan Murjoko (2025), Billahi (2025), serta referensi lain yang tercantum dalam daftar pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten kualitatif, dengan menelaah literatur untuk menemukan tema-tema pokok.

RESULTS AND DISCUSSION

Peran Pemerintah

Pada dasarnya sektor pemerintah dapat dikategorikan ke dalam sektor publik. Pemerintah adalah pelaku ekonomi yang menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat untuk menjalankan tugas sebagai pengendali masyarakat menuju kesejahteraan. Kendali tersebut berupa penyediaan layanan yang bermanfaat untuk publik (Putra, 2022). Peran pemerintah dalam perekonomian sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Pemerintah juga dapat berperan dalam berbagai aspek ekonomi, mulai dari regulasi hingga pengembangan infrastruktur.

Secara lebih spesifik, berikut akan dijelaskan peran pemerintah dalam perekonomian.

1. **Regulasi dan Pengendalian:** Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan peraturan yang mengatur aktivitas ekonomi. Mereka membentuk regulasi dalam bidang seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan kebijakan fiskal dan moneter, untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan ekonomi negara.
2. **Redistribusi Pendapatan:** Pemerintah berperan untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Pemerintah menggunakan instrumen seperti pajak progresif dan program bantuan sosial untuk mengalihkan pendapatan dari kelompok yang lebih kaya ke kelompok yang lebih miskin.
3. **Stabilisasi Ekonomi:** Pemerintah bertugas menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Mereka menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan mengurangi dampak dari resesi atau inflasi yang berlebihan.
4. **Pemberi Stimulus:** Pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi melalui program-program seperti infrastruktur, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta insentif fiskal untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.
5. **Pemberi Perlindungan:** Pemerintah memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dan pengusaha dari praktik bisnis yang merugikan, penipuan, monopoli, atau eksploitasi tenaga kerja. Mereka juga bisa mengadakan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi pasar internal dari persaingan internasional yang tidak adil.

Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen kebijakan utama, di antaranya yaitu APBN, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter, yang saling berhubungan dalam menjaga keberlanjutan

pembangunan ekonomi. Melalui tiga instrumen, pemerintah berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam meningkatkan pendapatan negara, pemerintah mempunyai peranan yang penting dengan cara memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya serta kebutuhan administrasi negara secara baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat daftar rencana pendapatan dan belanja negara secara sistematis dan rinci pada periode tahun anggaran. APBN dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan proyek pemerintah dan pembangunan, menggerakkan perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional, dan mencapai stabilitas perekonomian. Prioritas dan arah pembangunan APBN sangat jelas memegang peranan penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan nasional di bidang infrastruktur, perekonomian, pendidikan, prasarana dan sarana (Sinaga, et al., 2025).

Perkembangan APBN di Indonesia dapat dilihat dari pos-pos yang terdapat dalam anggarannya. Sisi penerimaan negara meliputi seluruh pemasukan dari cukai dan non-cukai, sedangkan sisi pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan. Terdapat beberapa pilihan untuk meraih tujuan tersebut, yaitu dengan meningkatkan pemasukan dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta menegakkan pengeluaran negara melalui penerapan ukuran keutamaan yang tinggi. Saat ini, salah satu fokus utama pemerintahan yang sedang berjalan adalah pemberantasan korupsi.

Berdasarkan informasi dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, terungkap bahwa kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp. 8,2 triliun. Kasus ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa, dana desa, serta belanja pegawai. Permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan anggaran negara ini tentu harus segera ditangani mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Hal ini jelas menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga infrastruktur yang mendukung kesejahteraan menjadi tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih efektif terhadap APBN yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya penyimpangan anggaran negara.

Dalam konteks negara, pengeluaran negara merupakan salah satu instrumen aturan moneter yang paling signifikan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam teori pembangunan ekonomi, terdapat hubungan timbal balik yang positif antara pengeluaran negara dan PDB. PDB berfungsi sebagai indikator yang mencerminkan nilai penghasilan produk dan layanan di suatu negara, yang terdiri dari penggunaan domestik, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengiriman bersih. Pengeluaran negara mencakup semua pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang terbagi menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengeluaran negara mencakup pengeluaran pegawai, pengeluaran barang, pengeluaran dana, pembayaran bunga, bantuan, hadiah, bantuan sosial, pengeluaran lainnya, dan pemindahan ke daerah (Lubis, et al., 2025).

Peran APBN menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

1. **Peran otorisasi.** Anggaran negara berfungsi sebagai fondasi untuk mengerjakan penghasilan dan pengeluaran pada tahun yang relevan.
2. **Peran perencanaan.** Negara dapat berfungsi sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas untuk tahun tersebut.
3. **Peran pengawasan.** Anggaran negara seharusnya menjadi acuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan aktivitas pemerintahan negara sesuai dengan peraturan.
4. **Peran alokasi.** Anggaran negara perlu ditujukan untuk mengurangi tingkat pekerja yang

menganggur dan pemborosan aset, serta untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan perekonomian.

5. **Peran distribusi.** Strategi anggaran negara perlu mempertimbangkan rasa kesetaraan dan kesesuaian
6. **Peran stabilisasi.** Anggaran pemerintah berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan dan berusaha mencapai harmoni mendasar dalam perekonomian.

Dalam pengelolaan anggaran negara, penerapan transparansi oleh pemerintah sangat penting. Hal ini disebabkan oleh sifat wajib transparansi, yang dapat membantu dan meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran negara untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap APBN. Selain itu, penerapan sistem transparansi juga berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Pengelolaan dan pelaksanaan APBN merupakan prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pihak yang berwenang, terutama yang bertanggung jawab. Pengawasan APBN dipandang sebagai alat yang berbeda dengan pengelolaan keuangan nasional. Namun pada kenyataannya, pengawasan merupakan komponen pengendalian penyelenggaraan keuangan nasional. Setiap tingkatan manajemen, menjalani pengawasan baik pada saat maupun setelah proses manajemen untuk mengetahui apakah tujuan organisasi telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dimulai dari DPR dan pemerintah dan berlanjut sepanjang tahun anggaran berjalan, di mana penggunaan anggaran tersebut dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan negara (Ulfah, et al., 2024).

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang sering juga disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy”, biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Irawan, 2023). Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi perkembangan perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Tujuan kebijakan fiskal lainnya juga yaitu untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (Mujasmara, et al., 2023).

Kebijakan fiskal dari sudut pandang ekonomi makro dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif dirancang untuk mengekang inflasi yang cepat, sedangkan kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk mendorong ekonomi dan menghindari resesi. Dalam kondisi ekonomi overheating akibat kenaikan daya beli masyarakat yang berlebih, kebijakan fiskal kontraktif berperan melakukan penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pendapatan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif ini bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan barang maupun jasa yang menjadi sumber perekonomian. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu, kebijakan fiskal ekspansif berperan melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah maupun penurunan pajak. Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran yang ada (Irawan, 2023).

Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah membenahi APBN dan permasalahan terkait APBN lainnya. Defisit APBN terjadi ketika pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas makroekonomi yang berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/pengangguran, dan keseimbangan gaji (Irawan, 2023).

Adapun instrumen pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu yang pertama ada kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Dalam penggunaan dua komponen tersebut menjadikan kebijakan fiskal dapat diketahui sebagai landasan penerimaan dan pengeluaran negara dilihat dari tingkat kondisi perekonomian, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, anggaran kebijakan fiskal tidak hanya di fokuskan untuk pengembangan aspek ekonomi saja, tetapi juga untuk menerapkan bentuk-bentuk kebijakan fiskal lainnya seperti perpajakan dan lain sebagainya (Markavia, et al., 2022). Secara lebih spesifik, instrumen kebijakan fiskal adalah,

- 1) Pajak. Sumber utama pendapatan negara yang dapat dinaikkan atau diturunkan untuk memengaruhi daya beli masyarakat. Penurunan pajak bisa mendorong konsumsi dan investasi, sementara kenaikan pajak digunakan untuk mengendalikan inflasi.
- 2) Pengeluaran Pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran untuk proyek infrastruktur, layanan sosial, atau pembayaran gaji PNS. Kenaikan pengeluaran bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengurangan pengeluaran biasanya dilakukan saat ingin mengendalikan inflasi.
- 3) Utang dan Obligasi. Pemerintah dapat menerbitkan obligasi atau meminjam uang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendanai pengeluaran negara di saat pendapatan pajak tidak mencukupi.
- 4) Alokasi Anggaran. Pemerintah dapat memprioritaskan sektor tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan, melalui pengalokasian anggaran. Misalnya, pada masa pandemi, pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk penanganan kesehatan.

Kebijakan fiskal juga sangat erat kaitannya dengan komitmen menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pengelolaan defisit APBN dan utang pemerintah menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan fiskal. Kebijakan fiskal harus diarahkan pada keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal negara agar tidak menghasilkan beban fiskal yang berlebihan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal adalah instrumen fundamental bagi pemerintah dalam menjalankan peran ekonomi. Melalui pengaturan pajak, belanja negara, dan defisit anggaran, pemerintah dapat menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan pemerataan pembangunan. Sinergi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter menjadi kunci tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah seperangkat tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dengan tujuan mencapai stabilitas harga, tingkat pekerjaan penuh, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen utama kebijakan moneter meliputi suku bunga, yang memengaruhi biaya pinjaman dan investasi, operasi pasar terbuka (OPT) yaitu kebijakan membeli atau menjual sekuritas pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang beredar, dan cadangan kas minimum yang menentukan persentase cadangan yang harus disimpan oleh bank umum (Mujiadi, et al., 2025). Tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan memulihkan kondisi perekonomian. Bank sentral sebagai otoritas moneter memiliki peran kunci dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui pengendalian besaran moneter dan suku bunga (Nuraini, et al., 2025).

Kebijakan moneter dalam perspektif Islam tidak hanya fokus pada aspek ekonomi konvensional, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan persaudaraan. Uang dipandang sebagai alat tukar yang bebas dari riba, dan kebijakan moneter didasarkan pada prinsip syariah seperti larangan riba dan sistem bagi hasil. Instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan

wakaf juga digunakan untuk mendukung distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, kebijakan moneter dalam Islam bertujuan menciptakan ekonomi yang adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat (Nuraini, et al., 2025).

Kebijakan moneter memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur jumlah uang beredar di suatu negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini diimplementasikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mencakup pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi jumlah uang beredar, tetapi juga berdampak langsung pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Lubis, et al., 2025).

Kebijakan moneter memegang peranan kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Secara umum, kebijakan ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu

1. Kebijakan moneter ekspansif

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah uang beredar guna mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbesar permintaan agregat, serta menekan tingkat pengangguran. Meski demikian, kebijakan ini tetap memiliki potensi memicu inflasi yang perlu diantisipasi.

2. Kebijakan moneter kontraktif

Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga, biasanya diambil saat perekonomian mengalami tekanan inflasi tinggi.

Sasaran kebijakan moneter di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yang masing-masing memiliki tujuan spesifik. Pertama, sasaran utama kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga stabilitas harga. Kedua, sasaran kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketiga, sasaran kebijakan moneter juga mencakup pengaturan jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, kebijakan moneter juga bertujuan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Kelima, sasaran kebijakan moneter juga mencakup peningkatan inklusi keuangan. BI berkomitmen untuk mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama di daerah-daerah terpencil (Lubis, et al., 2025).

Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kebijakan moneter dalam konteks perubahan ekonomi global dan nasional menurut Lubis dkk. (2025), faktor-faktor tersebut mencakup:

- 1) Dinamika Ekonomi Global. Perubahan dalam kondisi ekonomi global, termasuk fluktuasi mata uang, pertumbuhan ekonomi global, dan ketidakpastian geopolitik, memengaruhi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan moneter.
- 2) Teknologi Finansial. Kemajuan dalam teknologi finansial, seperti penggunaan blockchain dan fintech, memberikan tantangan baru dalam pengawasan dan regulasi kebijakan moneter.
- 3) Dinamika Pasar Modal. Fluktuasi pasar modal, likuiditas pasar, dan interaksi antara kebijakan moneter dan pasar modal memiliki dampak signifikan pada efektivitas kebijakan moneter.

Jika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya serta membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terealisasi dengan cara memberi sumber penerimaan normal dan mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara Indonesia bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Kebijakan moneter di Indonesia berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas, termasuk pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini harus diterapkan secara hati-hati dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik domestik maupun internasional.

CONCLUSION

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui berbagai instrumen kebijakan yang mencakup pengaturan anggaran, pengelolaan fiskal, serta

pelaksanaan kebijakan moneter. Berbagai tantangan ekonomi modern seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan, dan dinamika pertumbuhan menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat dan responsif. APBN menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara, sementara kebijakan fiskal digunakan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Di sisi lain, kebijakan moneter berfungsi menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan jumlah uang beredar agar perekonomian tetap terkendali.

Secara keseluruhan, sinergi antara APBN, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter merupakan landasan penting bagi terciptanya stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional. Ketiga instrumen ini tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan makroekonomi, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif, pemerintah dapat merespons perubahan kondisi ekonomi, memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang, serta memastikan arah pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAPHY

- Aminata, J., Nusantara, D. I. K., & Susilowati, I. (2022). The Analysis of Inclusive Green Growth In Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 23(1), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.13811>
- Angelia, A. N., Nabila, A., & Arifin, N. (2024). Implementasi Pemikiran Ekonomi Klasik pada Perekonomian Indonesia di Era Society 5.0. *JEB17: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(01), 83–96. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v9i01.6797>
- Azmi, Q. T., & Purwanto, I. (2024). Implementasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Pada Masyarakat Baduy. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 103–120. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22078>
- Fazaalloh, A. M. (2024). FDI and economic growth in Indonesia: A provincial and sectoral analysis. *Journal of Economic Structures*, 13(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s40008-023-00323-w>
- Fitria, T. N. (2016). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Haya Zen, N., & Mageiasti, L. (2025). Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 03(01), 775–785. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1316>
- Herlianto, D. (n.d.). KEPUTUSAN PREFERENSI INVESTASI ASET RIIL DAN ASET FINANSIAL DENGAN MODEL MINIMAX REGRET. 15.
- IFAN, M., ARYA, A. F. A., & AHMAD, G. (2024). Peran Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi: Studi Kepustakaan. *MONETER: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 181–191.
- Irawan, E. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 01–08.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Menuju “Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera.” <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a89e4c09-c3c8-4e8a-bbca-4952d5e8ad2d/SP-19-2025-RAPBN-Tahun-Anggaran-2026.pdf?ext=.pdf>
- Lubis, I. (2025). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Jumlah Uang Beredar Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Indonesia (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi, Universitas

Islam Sumatera Utara).

- Mahmud, A. M. (2020). PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91.
- Mila Marshela, Nurjaya, Sumarta, S., Kusyana, & Hudallah. (2025). Understanding and Implementation of Syariah in the Midst of Urban Modernity. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial...* 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i2.9>
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 2986–2997.
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Putri, Z. D. D., & Astuti, R. P. (2025). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207–213.
- Pusporini, I. D. (2020). Analisis pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(06).
- Putra, D. C. (2022). Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 805–808.
- Sinaga, C., Purba, D. N., Lisari, S. P., Syafila, S., & Pangestoeti, W. (2025). Keseimbangan APBN dalam Konteks Pembangunan dan Pengelolaan Utang Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 108–116.
- Ulfah, A. A., Salsabilah, A., Nasution, A. R., Lubis, K. S., Panjaitan, T., & Manik, M. M. (2024). Analisis Kebijakan Peran Pemerintah Dalam Membentuk APBN dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 26569–26578.